

-14-

REPUBLIKA KAMIS, 12 MEI 2016

# Lembaga Penyiapan Kepala Sekolah Diluncurkan

• YULIANINGSIH

Kepala sekolah diharapkan lebih kreatif, inovatif, dan berjiwa *entrepreneur*.

YOGYAKARTA — Penyiapan sumber daya manusia untuk mengisi jabatan kepala sekolah dinilai sangat penting. Untuk itulah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meluncurkan lembaga khusus untuk pembekalan dan penyiapan calon kepala sekolah. Wadah yang diberi nama Lembaga Penyelenggara Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah/Madrasah (LP3CKS) ini diluncurkan secara resmi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Rabu (11/5). Ratusan guru dan kepala sekolah Muhammadiyah di wilayah DIY, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, hadir dalam kegiatan tersebut.

Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PWM DIY Arif Budi Raharjo mengatakan, pembukaan LP3CKS merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah Muhammadiyah. "Kepala sekolah adalah nakhoda dan manajer bagi sebuah sekolah. Sehingga, menyiapkan sumber daya manusia untuk menduduki jabatan ini penting dilakukan," ujar dia.

Menurut Budi, LP3CKS nantinya berperan melakukan seleksi administratif terhadap guru potensial yang dinilai bisa menduduki jabatan kepala sekolah. Selain itu, lembaga tersebut juga akan memberikan pembekalan dan pelatihan khusus bagi calon kepala sekolah. Lembaga ini sekarang memiliki 16 master *training* dan 32 orang penilai. Sebagian besar diambil dari Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) Indonesia.

Selama ini, Budi mengatakan, baru ada LP3CKS yang menyiapkan sumber daya manusia untuk mengisi jabatan kepala sekolah di Indonesia. Padahal, jumlah sekolah sangat banyak, sehingga LP3CKS dinilai tidak melakukannya sendiri-

an. Apalagi, kata dia, lembaga tersebut juga menjadi penilai calon kepala sekolah. Karena itu, ia mengatakan, Muhammadiyah meluncurkan LP3CKS. Terlebih Muhammadiyah pun memiliki banyak sekolah.

Di wilayah DIY saja terdapat 432 sekolah Muhammadiyah. Terdiri atas 247 SD/Madrasah Ibtidaiyah (MI), 105 SMP/Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan 80 SMA/SMK/Madrasah Aliyah (MA). Tahun ini, sesuai peraturan pemerintah, menurut Budi, semua guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) akan dipindah dari sekolah swasta, termasuk Muhammadiyah. Padahal, kata dia, sepuluh persen kepala sekolah Muhammadiyah di DIY saja masih berstatus guru PNS. Untuk itulah keberadaan LP3CKS dinilai memiliki peranan penting menyiapkan sumber daya kepala sekolah.

Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Baedhowi mengatakan, kunci sukses dari mutu pendidikan di sekolah juga bergantung pada kualitas kepala sekolahnya. Menurut dia, kepala sekolah dituntut memiliki kompetensi

yang meliputi pengetahuan, keterampilan, serta perilaku. Kepala sekolah disebut harus bisa membawakan sikap sikap yang baik dalam manajemen dan memberikan pelayanan kepada siswa. Apalagi, kata dia, sekolah saat ini dituntut untuk bisa menjawab kebutuhan zaman. Yaitu, menghasilkan siswa dengan kompetensi yang bisa bersaing di dunia global. Selain itu, siswa yang berkarakter, serta memiliki bekal ilmu dan pengetahuan yang memadai. "Ini bisa diraih, jika penyiapan calon kepala sekolah dilakukan secara baik," kata dia.

Melalui LP3CKS, Baedhowi mengharapkan kepala sekolah Muhammadiyah nantinya bisa lebih kreatif, inovatif, dan mempunyai jiwa *entrepreneur* agar bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi sekolah.

Kepala LPPKS Indonesia Siswan dari mengatakan, 70 persen sekolah di Indonesia milik swasta. Ia menilai, pendidikan tidak akan maju jika pemerintah hanya mengurus sekolah negeri. Karena itulah LPPKS menggandeng lembaga swasta, LP3CKS.

■ ed: irfan fitrat